keamanan Indonesia. Apa yang mereka ceritakan pada anda, bahwa Timor Timur itu Komunis , sudah basi.

Kami tidak mau memreteli Indonesia. Faktanya adalah bahwa Timor Timur tidak pernah merupakan bagian dari Indonesia.

Saya himbau masyarakat dunia untuk memahami bahwa saatnya sudah tiba untuk menunjukan bahwa Tata Dunia Baru sudah dimulai. Ini memerlukan tindakan-tindakan yang akan mengakhiri situasi warisan masa lalu.

* Saya himbau masyarakat Eropa supaya konsisten dengan resolusi-resolusinya sendiri dan juga konsisten dengan semua resolusi yang telah diterima sehubungan dengan Timor Timur.

* Saya himbau segenap teman Timor Timur, para anggota parlemen dari Eropa, Amerika, Jepang dan Australia untuk menekan pemerintah-pemerintah mereka sendiri untuk mengubah standar ganda yang diterapkan terhadap kasus-kasus serupa dimana terjadi pelanggaran resolusi-resolusi PBB secara sistematis, seprti halnya perlakuan Indonesia terhadap Timor Timur.

* Saya himbau Presiden Bill Clinton untuk meninjau kembali masalah Timor Timur dan menekan Jakarta untuk bersedia berdialog dengan orang-orang portugis dan Timor Timur dalam usaha mencari suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh dunia Internasional.

* Saya himbau Pemerintah Portugal agar tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap timor Timur.

* Saya himbau Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah Timor Timur yang diusahakannya didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan hukum Internasional.

* Akhirnya saya himbau Pemerintah Indonesia untuk mengubah sikapnya dan menyadari bahwa saatnya sudah tiba untuk memahami hakekat perjuangan di Timor Timur.

Mulai hari ini, saya akan mulai menjalankan mogok makan, sebagai cara praktis untuk menghimbau Masyarakat Eropa, pemerintah AS dan pemerintah Australia.

Tidak ada persetujuan yang dapat dicapai antara seorang tahanan dan para penjaganya.

Kepada Sekjen PBB, saya ingin menyatakan bahwa saya siap ikut dalam proses perundingan kapan saja dan dimana saja. Saya tidak akan pernah menerima untuk menjadi bagian dari pihak Indonesia dalam perundingan-perundingan itu sebab saya tidak bersedia turut serta dalam sandiwara integrasi dan dalam penindasan yang kriminil dari bangsa saya.

Sebagai tahanan politik ditangan kekuatan yang menduduki tanah air saya, saya tidak peduli seandainya mereka pada hari ini akan menjatuhkan hukuman mati kepada saya. Mereka telah membunuh lebig dari sepertiga penduduk Timor Timur yang tidak berdaya. Mereka sedang membunuh bangsa saya dan saya tidak lebih berharga daripada perjuangan heroik bangsa saya yang karena mereka suatu bangsa yang kecil dan lemah selalu dipaksa tunduk kepada kekuatan asing.

Dili, 27 Maret 1993

(Tertanda)

X. Gusmao
Anggota CNRM
Komandan Falintil

TL 1723

SUARA RAKYAT
MAUBERE

TIMOR TIMUR MENGGUGAT
KUTIPAN - KUTIPAN DARI PLEIDOI
XANANA GUSMAO

LEKHAT

4



SUARA RAKYAT
MAUBERE

TIMOR TIMUR MENGGUGAT

KUTIPAN - KUTIPAN DARI PLEIDOI XANANA GUSMAO

LEKHAT

LEMBAGA KAJIAN HAK-HAK MASYARAKAT
1994

Suara Rakyat MAUBERE merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang perjuangan Timor Timur ke khalayak rakyat Indonesia. Melalui informasi yang benar tentang sejarah, aspirasi dan cita-cita perjuangannya, kita dapat ber-*empati* pada nasib bangsa Timor Timur. Seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: *"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."* Atas dasar itu, kami mengundang partisipasi anda untuk menggunakan media ini sebagai ajang tukar informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Perjuangan Rakyat Timor Timur. Direncanakan terbit setiap bulan.

Lembaga Kajian Hak-hak Masyarakat (LEKHAT), berdiri pada tanggal 10 Desember 1989 di Yogyakarta. Bidang kegiatannya meliputi Penelitian, Penerbitan dan Pembelaan hak-hak masyarakat. Misi utamanya adalah memperluas ruang demokrasi pada semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berlandaskan pada hak-hak universal.

Suara Rakyat MAUBERE merupakan salah satu bentuk penerbitan LEKHAT, yang ditujukan untuk memberikan informasi yang seimbang pada khalayak rakyat Indonesia atas perjuangan rakyat Timor Timur.

TIMOR TIMUR MENGGUGAT
KUTIPAN - KUTIPAN DARI PLEIDOI XANANA GUSMAO

Berikut ini kutipan-kutipan dari pleidoi setebal 56 halaman tulisan tangan dalam bahasa Portugis, yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Dili pada tanggal 17 Mei 1993 oleh Jose Alexandre ["Kay Rala Xanana"] Gusmao. Sesudah membacakan dua halaman pertama, Hakim memerintahkannya menghentikan pembacaan pleidoi ini. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini yang dikerjakan oleh sejumlah cendekiawan di Indonesia didasarkan pada terjemahan bahasa Inggris yang disebarkan oleh TAPOL serta edisi bahasa Portugis yang dimuat harian Publico yang terbit di Lisbao pada hari pembacaan vonis Xanana, tanggal 21 Mei 1993. Naskah asli pleidoi itu "diselundupkan" keluar Dili oleh Xanana melalui tas Amos Wako, utusan khusus Sekjen PBB yang menjenguknya untuk kedua kalinya di bulan April 1993.

Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah anda [Hakim] berikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya secara bebas, tanpa tekanan bentuk apapun.

Saya selalu telah menekankannya dalam semua pembicaraan saya dengan semua orang, termasuk pembicaraan saya dengan Dutabesar Indonesia untuk PBB, Tuan Nugroho, bahwa mengingat situasi saya pada saat saya menyampaikan pernyataan-pernyataan saya di Jakarta, pernyataan-pernyataan itu tak dapat dipercaya.

Saat inilah saatnya yang tepat untuk menjelaskan semua hal. Saya harap bahwa para cendekiawan Indonesia dapat memahami cara berpikir saya pada saat ini, ketika saya memanfaatkan kebebasan berpendapat saya sebagai konsekuensi dari hak-hak yang saya miliki.

Saya harap bahwa generasi baru Indonesia, atau tepatnya, para pemuda Indonesia akan menghargai pentingnya hak akan kebebasan, baik sebagai aspek dasar dari kehidupan manusia dewasa ini maupun di dalam masyarakat modern di mana kita hidup.

Akihirnya saya berharap bahwa masyarakat internasional akan menghargai seluruh pernyataan saya, mengingat waktu dan tempat dimana pernyataan ini dibuat.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Hakim [Ketua] yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan saya sendiri.

Saya adalah Kay Rala Xanana Gusmao, pemimpin perlawanan Maubere[1] melawan penyerbuan yang pengecut dan memalukan pada tanggal 7 Desember 1975 serta pendudukan secara kriminil dan ilegal Timor Timur selama 17 tahun.

Pada tanggal 22 November tahun lalu, saya menandatangani di Denpasar sebuah dokumen dimana saya menegaskan bahwa menurut hukum Internasional, saya tetap seperti orang Timor [Timur] lainnya, seorang warganegara Portugis dan bahwa saya, didepan hati nurani saya sendiri, adalah seorang warga Timor Timor.

Berdasarkan prinsip-prinsip itulah saya menolak kompetensi Pengadilan Indonesia manapun untuk mengadili saya, khususnya wewenang sidang pengadilan ini yang telah dipaksakan dengan kekuatan senjata dan perbuatan-perbuatan kriminal kepada tanah air saya, Timor Timur.

Saya percaya akan teori tentang kolonialisme yang mengatakan bahwa kolonialisme adalah penguasaan atas bangsa lain, dengan menduduki wilayah bangsa itu lewat pemaksaan kekuatan.

Secara a priori, teori-teori konservatif yang membenarkan kolonialisme dengan dalih menyebarkan peradaban barat, hancur dengan bangkitnya jatidiri (identitas) bangsa-bangsa bekas jajahan.

Sebagaimana halnya undang-undang setiap negara dibuat berdasarkan tuntutan untuk mengatur hubungan diantara individu- individu [di negara itu], maka hukum Internasional lahir dari tuntutan untuk mengatur secara damai hubungan antara bangsa- bangsa dan negara-negara [didunia].

Saya percaya bahwa hukum Indonesia, yang tidak terbatasa pada hukum adat, juga didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum konvensional.

[1]) Istilah "Maubere" ini adalah istilah bahasa Mambai untuk rakyat kecil, yang diadopsi oleh Fretilin dalam kosakata politik mereka, mirip istilah "Marhaen" dalam kosakata politik Indonesia. *Penterjemah*

Makanya begitu penting untuk dikemukakan, bahwa sebagai salah satu anggota PBB, negara Indonesia telah mengikatkan diri, dihadapan masyarakat Internasional, untuk menghormati dan memberikan kontribusi kepada keutuhan hukum Internasional.

Saya percaya bahwa pers Internasional tidak luput menyaksikan usaha-usaha mereka yang sidang ini menjadi suatu panggung sandiwara ppolitis. Seandainya usaha-usaha itu telah luput dari perhatian, saya sekarang ingin meminta perhatian setiap orang pada kenyataan bahwa saya merasa sebagai seorang asing di tanah air saya sendiri.

Dipenjara di polwil saya dikelilingi sepenuhnya oleh orang- orang Indonesia, penjaga-penjaga saya adalah perwira-perwira dari BAIS dan anggota-anggota Kopassus. Saya pernah minta dikunjungi oleh Uskup dan mereka mengirim seorang pastor India yang membela integrasi [pastor Bareto - penterjemah]

Disini, dalam apa yang disebut sidang pengadilan ini, saya hanya melihat orang-orang Indonesia, khususnya tentara Indonesia dari Kopassus dan BAIS. Menurut hukum Indonesia, sidang-sidang pengadilan semacam ini biasanya, atau seharusnya, dilangsungkan didepan khalayak ramai (publik). Setiap kali saya melangkah masuk keruang sidang pengadilan ini, publik yang saya lihat adalah para pejabat militer yang sama, yang sebagian diantaranya adalah aktor-aktor utama dalam perkara saya selama masa penahanan saya. Orang-orang Timor [Timur], saudara-saudara setanah air saya, berada diluar, dijalanan, dibawah pengawasan ketat. Ini menunjukan kekuasaan telanjang dari kekuatan pendudukan. Ini adalah pertunjukan penindasan asing, dominasi asing yang menunjukan penghinaan yang penuh kemasabodohan daripada penjajah.

Permasalahan Timor Timur adalah tanggung jawab masyarakat Internasional. Ini adalah suatu masalah, dimana prinsip-prinsip Internasional menjadi taruhan, suatu kasus dimana norma-norma dekolonisasi PBB telah dimanipulasi, suatu kasus dimana Indonesia telah tidak mengindahkan resolusi-resolusi PBB, karenanya ini suatu kasus dimana prinsip-prinsip gerakan Non- Blok serta prinsip-prinsip universal tentang hukum, perdamaian, dan keadilan telah dilanggar secara sembrono.

Setiap orang Indonesia telah terikat pada kebijakan bangsanya sendiri, dan pengertian mereka tentang Timor Timur merupakan produk dari cara bagaimana pemerintah mereka Timor Timur, keuali apabila mereka mau mendengarkan suara hati nurani mereka dan mengikatkan diri mereka pada prinsip-prinsip universal tentang keadilan, kebebasan, dan penegakan hukum.

Sementara itu, Timor Timur, selama 17 tahun telah menjadi kisah kepalsuan Indonesia yang luar biasa. Selama hampir empat bulan saya telah dimanfaatkan sebagai bagian dari kepalsuan yang memalukan ini. Apakah saya telah dimanfaatkan secara lihai atau secara malang, bukan sayalah yang harus menilai.

Pengadilan ini menyatakan bahwa lembaga ini mengadili saya karena kejahatan-kejahatan yang saya lakukan terhadap negara Indonesia dan karena memiliki senjata api secara ilegal. Saya tahu bahwa semuanya telah diatur agar dapat disita pada saat penggerebekan saya....

Sesungguhnya yang seharusnya berdiri didepan suatu Mahkamah Internasional, adalah pertama-tama:

- Pemerintah Indonesia untuk kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya selama 17 tahun terakhir di timor Timur

- Pemerintah AS yang telah menyalakan lampu hijau bagi penyerbuan pada tanggal 7 Desember 1977 dan sejak saat itu telah memberikan bantuan militer dan dukungan politis bagi pembunuhan bangsa (Genoide) yang dilakukan Indonesia di timor Timur.
- Pemerintah-pemerintah Australia dan eropa Barat karena politik keberfihakan mereka kepada Indonesia.
- Dan akhirnya, pemerintah Portugal untuk ketidak bertanggungjawaban mereka yang keterlaluan dalam proses dekolonisasi Timor Timur.

PBB menganggap sah segala bentuk perlawanan terhadap kehadiran kekuatan kolonial di daerah manapun didunia dimana rakyatnya berjuang untuk pembebasan. Perjuangan saya dan perlawanan rakyat saya dan Falintil[2] harus diletakkan dalam konteks ini, diatas hukum Indonesia.

Tuan Sudjono, dalam eksepsinya telah mencoba mengambil sikap yang liberal ketika ia mempertanyakan 'Deklarasi Balibo', namun ia tidak mempersoalkan hal yang lebih mendasar keilegalan pencaplokan Timor Timur dengan kekuatan senjata. Persoalan pokok dalam sidang ini adalah apa yang disebut "proses integrasi Timor Timur".

Dalam daftar tuduhan tuan jaksa tercatat bahwa pada tanggal 30 November 1975, partai-partai UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menandatangani proklamasi integrasi Timor Timur kedalam Indonesia. Dalam daftar tuduhan yang sama dinyatakan bahwa masyarakat Timor Timur berhak menentukan nasib mereka sendiri, lalu, bagaimana pengertian tuan jaksa tentang konsep penentuan masa depan sendiri, atau dengan kata lain penentuan nasib sendiri?

Tak dapat dielakkan, bahwa jawaban yang akan diberikan terhadap pertanyaan diatas adalah bahwa konsep itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang mematuhi norma-norma tertentu, agar proses tersebut dapat diakui oleh dunia Internasional.

Malah saya juga ingin bertanya: [pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri] harus diakui dihadapan siapa ? Soalnya, ini menyangkut suatu proses untuk sebuah bangsa yang ingin menentukan masa depan mereka sendiri.

Para anggota partai UDT yang terlibat dalam proses [pada tanggal 30 November 1975], telah membuka kedok mereka sendiri, baik di PBB maupun di lembaga-lembaga Internasional lainnya, tentang kepalsuan proklamasi tersebut.

Saya ingatkan anda disini bahwa di Denpasar saya dipaksa untuk membuat pernyataan permintaan maaf pada angkatan darat Indonesia atasa pembantaian di Santa Cruz, pembantaian yang dilakukan oleh angkatan darat Indonesia dan bukan oleh saya. Saya ingatkan anda pula bahwa di jakarta saya menyatakan, atas perintah khusus gubernur boneka, Abilio Osorio, bahwa saya bersedia menyerah.

Apakah dapat diakui pembentukan pemerintah sementara propinsi baru Irak di Kuwait ? Padahal Kuwait tetap memelihara ikatan etnis, historis, kultural, dan religius yang kuat dan langsung dengan Irak, dibandingkan dengan beberapa ikatan yang masih saya ingat dahulu di Zaman batu antara penduduk Timor Timur dan beberapa pulau di nusa Tenggara Timur (NTT).

---

[2]) Angkatan bersenjata gerakan pembebasan Timor Timur yang langsung berada di bawah CNRM (Musyawarah Nasional Perlawanan Rakyat Maubere). *Penterjemah.*

Apabila pembentukan pemerintah sementara di kuwait itu dianggap tidak sah, tidak sah didepan siapa ? Bukankah itu ditinjau dari prinsip-prinsip yang universal tentang penentuan nasib sendiri, berdasarkan hukum Internasional ?

Peradilan ini menyatakan bahwa Fretelin telah berani memaksakan keinginannya kepada masyarakat Timor Timur, lalu bagaimana dengan partai-partai yang menandatangani sebuah deklarasi tentang integrasi ? Berarti, pengadilan telah berkesimpulan bahwa pernyataan itulah yang betul-betul mencerminkan kehendak rakyat Timor Timur.

Untuk apa pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan di Indonesia ? Untuk mewujudkan apa ? Untuk membuktikan apa ? jika tidak pernah dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu, berarti pemilu di Indonesia hanya merupakan suatu penipuan. Jika tidak untuk mewujudkan sesuatu, pemilu di Indonesia tidak mempunyai arti politis dan tidak punya kekuatan yuridis sebagai seyogyanya hasil obyektif yang diharapkan dari suatu pemilihan umum.

Sidang pengadilan ini pasti sependapat dengan saya bahwa sidang ini telah melangkah terlalu jauh dengan menyatakan bahwa Fretelin "telah berani memaksakan kehendaknya pada rakyat" dan bahwa proklamasi Bali Beach[3] mencerminkan pendapat rakyat Timor Timur yang sesungguhnya. Sidang pengadilan ini mengabaikan satu unsur politis yang dapat memberikan keabsahan yuridis yang dikehendaki setiap orang pernyataan kehendak mayoritas rakyat. Ini merupakan syarat mutlak (onditiosine qua non)

Sampai saat in, PBB tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur, suatu kedaulatan yang telah dipaksakan dengan kekuatan senjata, dipaksakan dengan kekerasan dan dengan pelanggaran secara sistematis dari hak-hak manusia yang paling asasi.

Pengadilan ini menyebutkan tanggal 17 Desember 1975 sebagai hari pembentukan suatu pemerintah sementara dan suatu dewan musyawarah lokal.

Dan karena semua orang Indonesia telah lupa, adalah kewajiban saya untuk mengingatkan adanya suatu hari berkabung yakni tanggal 7 Desember ditahun yang sama, pada saat ribuan pasukan payung Idonesia diterjunkan diatas kota Dili dengan dukungan Angkatan Laut.

Tanggal 7 Desember 1975 yang menyaksikan penyerbuan Indonesia secara pengecut dan memalukan, hari pada saat pasukan-pasukan Indonesia secara tanpa pilih bulu membantai penduduk kota Dili yang tak mampu membela diri mereka, yang mengakibatkan gugurnya ribuan orang tua, perempuan dan anak-anak, termasuk seorang wartawan Australia.

Sementara "deklarasi Balibo" ditandatangani dengan darah empat orang wartawan Australia yang dibunuh oleh tentara Indonesia pada saat penyerbuan desa Balibo, apa yang menamakan dirinya pemerintah sementara Indonesia dibentuk diatas mayat-mayat orang Timor yang dibantai antara tanggal 7 dan 17 Desember pada tahun itu.(...)

---

[3]) Di sini ia merujuk lagi pada apa yang di kalangan Indonesia dikenal sebagai 'Deklarasi Balibo', yang konon ditandatangani di Balibo, Timor Timur, oleh sejumlah orang Timor Timur pada tanggal 30 November 1975. Naskah itu sesungguhnya ditandatangani oleh lima orang politisi Timor Timur yang pro-Indonesia – Amaldo do Araujo, Guilheme Goncalves, Jose Martins, Joao Carrascalao, dan Joao Martins– di hotel *Penida Fiew* di Bali milik Kol. Soegianto, seorang agen Opsus waktu itu, Mereka bekerja lembur di sana dari tanggal 29 malam sampai tanggal 30 jam lima pagi. Sesudah itu mereka segera diterbangkan dari Denpasar ke Kupang dengan pesawat Garuda Fokker F-25, kemudian dari Kupang ke Atambua (Timor Barat, wilayah RI) dengan pesawat Merpati kecil, supaya pagi hari itu juga dapat membacakan naskah itu di depan Menlu Adam Malik dan sekitar 30 ribu orang pengungsi Timor Timur. *Penterjemah*

Pada tanggal 12 Desember 1975, tentara Indonesia belum berhasil menguasai persimpangan jalan diwilayah Aileu dan Remexio. Hari- hari dibulan Desember 1975 itu menyaksikan gerak majunya pasukan-pasukan penyerbu untuk merebut daerah Aileu. pada tangal 31 Desember 1975, daerah maubisse [didaerah Ainaro] belum berhasil direbut oleh pasukan penyerbu.

Mereka membantai secara membabibuta laki-laki, orang tua, perempuan dan anak-anak. Mereka juga membantai ratusan ekor kerbau, sapi, dan kuda. Mereka membakar seluruh yang ada dihadapannya, membantai semuanya.

Hal yang sama terjadi kemudian di sektor perbatasan utara (fronteira norte) yang mencakup kabupaten-kabupaten (concelhos) Ermera dan liquica. Penduduk menjadi korban penyerangan-penyerangan terhadap mereka.

Operasi [militer] yang sama dilanjtkan disektor tengah utara (entro norte), yang mencakup kabupaten-kabupaten Dili, Aileu dan sebagai Manatuto. Lebih dari ribuan orang menjadi korban pada tahun-tahun dimana TNI berusaha mengendalikan penduduk Timor Timur.

Menyusul kemudian sektor tengah selatan (centro sul), yang meliputi kabupaten Same [Manufahi] sampai Soibada/Barike. dijakarta, ada seorang jendral [namanya tak terbaca] yang menjadi orang kedua di BAIS, yang suka mengumbar kepahlawanannya:saya ambil Laclubar, saya ambil Soibada, saya ambil Barike, dan lain-lain.

Dalam bahasa Portugis maupun dalam bahasa militer, "ambil" berarti menguasai atau menaklukkan. Pada waktu itu, tuan-tuan yang terhormat, hampir dua tahun telah berlalu setelah apa yang dinamakan integrasi, yang dilakukan atas kehendak bebas rakyat.(...)

Masalah Timor Timur tidak dapat dipandang dalam konteks yuridis [domestik] Indonesia, melainkan harus dalam konteks yuridis Internasional, yang lebih tinggi kedudukannya daripada undang- undang Indonesia.

Untuk melecehkan konteks [yuridis Internasioal] itu, peradilan menyatakan dengan angkuhnya, bahwa Fretelin memaksakan kehendaknya kepada rakyat, dengan melaksanakan Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Saya ingatkan bahwa Republik Timor Timur telah mendapat pengakuan dari 20 negara, dan jumlah itu dapat ditambah, seandainya tidak terbentur pada kepentingan-kepentingan ekonomi AS, Australia,dan lain-lain, dengan Jakarta. (...)

Berkaitan dengan masalah tersebut, saya juga ingatkan bahwa Saddam Hussein telah memperingatkan masyarakat Internasional, bahwa ada satu Presiden dalam hal ketidaktaatan terhadap prinsip-prinsip universal dalam pelanggaran hukum Internasional ia secara jelas menyebutkan Timor Timur.

Nilai apakah yang diberikan oleh Indonesia pada Resolusi- resolusi Dewan Keamanan (DK) dan sidang Umum (SU) PBB ? Apakah [keputusan-keputusan] itu bersifat politis belaka, ataukah punya nilai yuridis yang kuat, sehingga mengizinkan dilangsungkannya Operasi Badai Gurun ?

Nilai apakah yang diberikan Indonesia kepada usaha-usaha PBB dan masyarakat Internasional dalam penyelesaian konflik eks Jugoslavia ?

Nilai apakah yang diberikan oleh Indonesia, dan dalam konteks apa Indonesia memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian konflik kambodia ? (...)

Dapatkah suatu pemerintahan yang menahan sejumlah penduduk kota Dili yang diawasinya, tapi terhalang untuk bergerak ke gunung- gunung tanah airnya, mewakili kehendak mayoritas rakyat Timor Timur ?

Peradilan ini menganggap kurang penting petisi 31 Mei 1975. Petisi tersebut tampaknya ditandatangani oleh Arnaldo (do) Araujo dan Guilherme Goncalves.

Pada tanggal 31 Mei 1975 itu, lebih dari 80% rakyat Timor Timur berada di gunung-gunung tanah air mereka, menghadang serangan tentara penyerbu, yang berusaha mengambil lagi

desa-desa dipedalaman. Ramalan-ramalan para ahli strategis Indonesia yang mengatakan bahwa Timor Timur dapat diambil dalam waktu 24 jam, dengan mendarat di Dili pada waktu subuh, makan siang diBacau, lalu menginap di Tutuala, ternyata hanya merupakan mimpi para jenderal yang ekspansionis.

Pada tanggal itu tentara Indonesia hanya menguasai beberapa desa yang dekat dengan jalan-jalan raya utama, desa-desa yang kebanyakan telah ditinggalkan oleh penduduknya.

Apa dan bagaimana bentuk kontrol de facto pemerintahan boneka (Arnaldo Araujo) terhadap penduduk saat itu ?

Penduduk yang sedang meninggal karena kelaparan dan penyakit, yang disebabkan oleh perang yang dilancarkan oleh Indonesia ? Penduduk yang diserang oleh pasukan tentara Indonesia, yang menjadi sasaran pemboman dari udara, darat, dan l;aut, yang dilakukan oleh TNI ?

Apakah ini hanya kebetulan, bahwa penduduk ini menderita dihutan, lantaran perang yang dilancarkan oleh Indonesia ? Penduduk yang rumahtangganya tercerai-berai, hartanya dirusak oleh pasukan Indonesia dengan mengunakan taktik bumi hangus, apakah penduduk ini yang minta dengan kehendak hati nuraninya sendiri untuk berintegrasi dengan Indonesia, tanpa referandum ?

Pada tanggal itu, 31 mei 1976, pada tanggal petisi integrasi yang ditandatangani oleh Arnaldo Araujo dan Guilherme Goncalves di Dili telah tercatat dua resolusi di PBB, satu disidang Umum yang menyatakan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional, dan dua resolusi di Dewan Keamanan yang mengutuk invasi tanggal 7 Desember 1975 serta menuntut penarikan segera dan menyeluruh dari pasukan penyerbu Indonesia.

Disini saya kemukakan pada khalayak ramai tentang adannya keraguan saya terhadap kehendak bebas Arnaldo (do) Araujo maupun Guilhenrme Goncalves. Dihari-hari akhir hidupnya, Arnaldo (do) Araujo merasa bingung terhadap proses aneksasi itu, dan bukan itu saja, ia juga menyesal menjadi alat propaganda Indonesia secara mudah. Ada juga kasus seorang Abel Belo, dari Baucau (sic) dan seorang Joao Martins, anggota Presidium Apodeti yang terbunuh dengan diracun, setelah hak-hak istimewa integrasi dicabut, karena menyesal telah memberikan kontribusi dalam penyerbuan dan pendudukan tanah airnya serta pembantaian saudara-saudaranya.

Guilherme Goncalves juga saya ragukan kehendak bebasnya, karena ia telah menjadi salah seorang pionir jaringan komunikasi saya ke Luar negeri.

Suatu pemerintah yang dibentuk ditengah-tengah gemuruh penembakan dari darat dan laut terhadap penduduk yang tidak berdaya, ditengah-tengah deru tank dan meriam yang maju menyerbu, dapatkah suatu pemerintah semacam itu mengaku punya kedudukan yuridis apapun ? Menurut hemat saya, pemerintah semacam itu punya kedudukan yang sama seperti tentara Irak di Kuwait, punya dimensi yang sama seperti tank-tank rusia yang menyerbu masuk ke Kabul, punya karakter yang sama seperti invasi Kambodia oleh vietnam.

Sidang pengadilan ini telah mengatakan bahwa fretelin menentang referandum, apabila rakyat akan memilih integrsi. Kendati demikian, dengan megutip apa yang disebut petisi [integrasi] itu, sidang pengadilan menyebutkan bahwa Arnauldo do Araujo, Guilherme Goncalves, dan sang presiden, Jenderal Suharto, meyakinkan Parlemen [Indonesia] untuk menyetujui integrasi secara tergesa-gesa, tanpa suatu referandum apapun.

Berarti, siapa sebenarnya yang tidak menghendaki referendum, fretelin, atau Indonesia ?
Atas nama rakyat yang mana petisi itu ditandatangani ?

Saksi Oscar Lima telah menyebutkan dalam sidang peradilan ini, bahwa ia berada di gunung-gunung sejak Desember 1975 sampai akhir tahun 1978. Apabila ia dapat berkata secara jujur, ia akan bercerita tentang operasi-operasi strategis yang dilancarkan oleh TNI, milai bulan September 1977, yang bertujuan untuk mematahkan basis-basis perlawanan penduduk Timor Timur.

Saya tahu bahwa masyarakat awam di Indonesia belum memiliki informasi tentang aspek-aspek ini, makanya saya akan merinci operasi-operasi militer yang dahsyat itu, yang dilancarkan setahun setelah integrasi Timor Timur kedalam Indonesia, yang ini perlu dicatat, katanya dilakukan atas kehendak bebas rakyat.

Diawal September 1977, berbatalyon-batalyon tentara Indonesia, didukung oleh pesawat-pesawat OV-10 Bronco serta pemboman secara intensif dari laut dan darat, mengepung wilayah-wilayah yang meliputi kabupaten-kabupaten Suai [Covalima], Bobonaro [Maliana], dan Ainaro yang disebut perbatasan selatan (fronteira sul)

Ribuan jiwa penduduk meninggal dunia akibat tembakan peluru.

Penduduk lainnya, setelah ditangkap, terus-menerus meninggal dunia akibat kelaparan, penyakit, dan khususnya, akibat pembantaian-pembantaian.

Ribuan dan ribuan penduduk Timor Timur telah dibantai hampir di seluruh wilayah Timor Timur oleh pasukan pendudukan. Politik yang berlaku adalah hukum teror, supaya siapa saja orang Timor Timur terintimidasi untuk menyatakan bahwa ia senang dengan Integrasi.

Harga aneksasi Timor Timur adalah harga perlawanan rakyat Maubere. Lebih dari 200 ribu orang telah dibunuh oleh perang yang dipaksakan oleh Indonesia. Lebih dari sepertiga penduduk Timor Timur harus membayar penolakannya terhadap penjajah baru yang lebih represif, yang dengan mengejutkan melanggar prinsip- prinsip PBB maupun Gerakan Non Blok yang ikut dirintis pendiriannya oleh Indonesia yang kini bahkan menjadi ketuanya.

Saya telah banyak dikuliahi tentang keterbelakangan koloniallisme portugal, seolah-olah saya sendiri tidak hidup dibawah kolonialisme itu.

Mereka juga telah berusaha menunjukan pada saya pembangunan Timor Timur seolah-olah itu hanya persoalan statistik saja, untuk dibandingkan dengan periode penjajahan portugal.

Saya ingin bertanya, apakah kolonialisme dapat dikuantifikasikan sehingga ada yang dapat dianggap baik, dan ada yang dapat dianggap jelek.

Hari ini, pemerintah Indonesia dapat menunjukan pada dunia penguasaan de factonya terhadap daerah ini, dan menyatakan dirinya membangun daerah yang didudukinya, sambil pada saat yang sama mengutuk pihak yang lain yang tidak dapat melakukan hal itu, yakni portugal.

Jadi, apakah karena portugal gagal membangun Timor Timur selama empat ratus tahun, lalu kami orang Timor harus menebus kesalahan penjajah yang satu sambil sekaligus juga harus menanggung kejahatan penjajah yang lain ?

Sekarang semua teori yang dibuat tentang kolonialisme atau mengenai pendirian atau pembentukan negara-negara baru, harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan berdasarkan hukum Internasional...(tidak jelas)

Berdasarkan prinsip-prinsip itu dan hukum Internasional, maka dapat dipahami posisi Indonesia dalam menghadapi PBB, berkenaan dengan kasus-kasus sebagai berikut :

(a). Sebagai anggota PBB dan berdasarkan penafsiran yang tepat mengenai hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan nasional, Indonesia, dan bersama-sama negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, bertanggung jawab ats pencantuman Kaledonia Baru dalam dafta wilayah-wilayah tidak otonom, dan empat dasawarsa kemidian menghapus daerah itu dari daftar wilayah tidak otonom

(b). Tidak terbaca

(c). Berdasarkan pemahaman yang tepat atas prinsip-prinsip universal, Indonesia mengutuk invasi Vietnam di Kamboja, invasi eks-Uni Soviet di Afganistan, dan invasi Irak di kuwait.

(d). Sebagai anggota PBB, Indonesia ikut sebagai peserta dalam proses perdamaian di kamboja sebagai kontribusi yang wajib diberikan oleh jakarta kepada masyarakat Internasional untuk menghormati resolusi-resolusi PBB.

Saya telah dihubungi oleh perwira-perwira (asal) Irian jaya yang bercerita pada saya tentang keluarga besar Indonesia yang hebat dan mereka membuat saya muak. Saya berjumpa seorang Sumatra penterjemah bagi BAIS yang dapat berbahasa portugis dan hanya penuh pujian bagi saudara-saudaranya dari Jawa, dan perut saya mual lagi. Saya telah bertemu perwira-perwira dari Sulawesi yang mengajarkan saya standar-standar Indonesia dan saya merasa kehampaan dalam diri saya.

Konsep realpolitik telah memperoleh dimensi baru bagi saya. Realisme politik adalah ketundukan politis, pengingkaran hati nurani pribadi, matinya hati nurani suatu bangsa.

Saya faham sekali apa yang menakutkan Indonesia pada hari ini, seperti juga dihari-hari yang lampau. [Hal ini adalah] anakronisme/keortodoksan ideologis dari kelompok-kelompok etnis yang telah mendorong perang di yugoslavia dan di republik- republik yang dulu termasuk Uni Soviet.

Teori-teori tidak membuktikan bahwa sejarah itu benar, sebaliknya sejarah yang membuktikan teori-teori mana yang benar dan mana yang salah.

Umat manusia menginginkan satu ideal yang tinggi: realisasi individu dan masyarakat dalam konteks kebebasan yang luas, keadilan, dan perdamaian.

Realisme politik merupakan satu teori yang dipaksakan oleh pihak yang kuat,konsep yang telah dan sedang menumbangkan asas- asas itu Realisme politik merupakan konsep yang hanya memberikan hak kepada yang besar, kuat, untuk bertindak atas nama kepentingan-kepentingannya sendiri, melarang yang kecil dan yang lemah untuk mampu membela diri, menolak dan melawan.

Bila kita membicarakan realisme politik, secara tersirat kita membicarakan ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan syarat- syarat antara dua pihak yang terliabt dalam proses apa saja.

Ketidaksamaan itu yang memaksakan kepada yang kecil dan lemah agar tampil sebagai pelajar realisme politik yang baik.

Jakarta kadang-kadang suka memberi definisi, bahwa faktor demarkasi perbatasan-perbatasan oleh kolonialisme hanya berlaku untuk Afrika, dengan begitu tidak berlaku di Asia.

Argumen ini tidak masuk akal bila kita memperhatikan bahwa Indonesia sendiri mewarisi suatu wilayah yang berasal dari faktor ini, yakni perbatasan wilayah yang dibuat oleh kolonialis.

Mari kita lihat Pulau Borneo telah dibagikan, bagian utara milik Malaysia, bagian selatan milik Indonesia, dan daerah kantong yang belakangan ini telah merdeka, Brunei [Darussalam]

Dipulau New Guinea, bagian baratnya dinamakan Irian jaya milik Indonesia dan bagian timur menjadi sebuah negara merdeka, Papua New Guinea.

Jika seorang Irian Jaya menganggap diri bagian dari keluarga yang sama dengan seorang jawa, anggapan tersebut tidak ada hubungannya dengan saya, sebab saya bukan anggota keluarga Irian jaya, apalagi anggota keluarga jawa.

Fakta-fakta yang diuraikan Tuan Sudjono bersumber dari pengertian-pengertian keliru yang dipunyainya sebagai warganegara Indonesia yang terikat pada kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Untuk diketahui saja, ia ditunjuk [menjadi pembela saya] oleh BAIS dan karenanya oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 22 Desember [1992], saya telah membaca sebuah surat yang dialamatkan pada saya oleh LBH [YLBHI]. pada tanggal 23 Desember [1992] saya menjawab ke organisasi itu, menyetujui pembela mereka. Tapi saya dipaksa membatalkan rencana itu. Pada tanggal 30 dibulan yang sama, saya diharuskan menulis surat kepada LBH [YLBHI] untuk menolak tawaran mereka. Surat saya yang semula, yang telah mereka tangkal, telah dikembalikan pada saya.

Setelah tiga bulan pengalaman pribadi saya ini, saya betul- betul menghargai perkataan Ximenes Belo [Uskup Dili] ketika saya bertemu dengan beliau di Fatumaca, dimana beliau menyatakan bahwa kami sedang diserap secara total.

Selama masa interogasi saya di BAIS di Jakarta, saya mulai menyadari hal-hal yang berikut :

(1). Perang di Timor Timur pada hakekatnya adalah urusan BAIS dan bukan urusan para politisi dan lembaga-lembaga pemerintahan di Jakarta, sebagaimana yang diperkirakan orang.

(2). (Tak terbaca)

(3). BAIS adalah suatu mesin yang penuh kekuasaan dari polisi rahasia Indonesia dan kopassus adalah tangan-tangan guritanya yang menakutkan.

(4). Tentara Indonesia tidak menerima kebijakan lain selain yang dimulai pada tanggal 7 desember 1975.

Dalam kasus saya, naik BAIS maupun pemerintah Indonesia telah memutuskan memainkan [kasus saya] dengan mengambil resiko sekecil mungkin, dengan memanipulsi seluruh prosesnya. Supaya saya dapat berada disini hari ini dan dapat berbicara seperti yang saya lakukan sekarang, saya juga memutuskan untuk mengambil resiko yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan saya. Saya selalu ingatkan setiap orang bahwa "Anda sedang berbicara dengan Xanana dan bukan dengan salah seorang anggotanya.

Situasi saya sendiri dimana seluruh gerak-gerik saya diawasi secara ketat mengingatkan saya pada pengawasan total menyusul pembantaian secara pengecut di santa Cruz terhadap penduduk Dili, khususnya terhadap pemuda[i] Timor timur yang penuh semangat kepahlawanan.

Di Polwil dimana mereka telah mencoba mengambil hati saya dengan perhatian yang berlebih-lebihan, [namun] tulisan-tulisan yang ditulis/diukir oleh para tahanan, teman-teman saya, di dinding penjara, terus mengingatkan saya pada penderitaan banyak saudara sebangsa saya, yang jadi korban berbagai bentuk penyiksaan dan juga terus mengingatkan saya pada tanggal 12 Desember 1991 yang tak akan terlupakan. Apa yang diinginkan oleh demonstrasi damai pada tanggal 12 November itu ? mengingat Jakarta dan mengingatkan dunia bahwa ada sesuatu yang sungguh- sungguh salah di Timor Timur.

Pada hari penangkapan saya, dalam pertemuan saya dengan Jenderasl Try Sutrisno, saya menyinggung masalah perlunya dialog dengan wakil-wakil rakyat timor Timur. Satu diantara ke-20 jenderal yang hadir dan yang sedang sibuk memberikan selamat satu sama lain atas kemenangan mereka yang mudah, bertanya kepada saya, dengan marah: "Rakyat mana ?" dan ketika saya menjawab: Mari kita selenggarakan referandum", Jenderal-jenderal Indonesia itu terpaksa menelan ketinggian hati mereka. dan hari berikutnya, pada tanggal 21 November ketika saya sudah berada di Denpasar ketika isteri dari seorang Panglima setempat keheran-heranan atas besarnya dukungan kepada saya, perempuan itu berkata: "Kelihatannya, banyak orang mendukung dia", yang disambung oleh perwira tinggi: "Barangkali, seluruh rakyat Timor Timur".

Tuan Pieter Kooijmans adalah pelopor PBB yang dikirim ke Timor Timur dengan persetujuan Jakarta untuk melakukan penyelidikan di tempat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang selalu disangkal oleh Indonesia di PBB. Disaat kunjungannya itulah, suatu pembantaian dilakukan dengan tangan dingin.

Mayat-mayat telah menghilang pada hari itu atau, lebih tepat, dibuang kedalam kuburan-kuburan massal. dimana ? Hanya pasukan- pasukan pendudukan yang tahu. Banyak diantara para pembunuh itu hadir diruang ini, orang-orang Kopassus, orang-orang Intel, orang-orang yang didalam tangannya menguasai seluruh kehidupan politik di Timor Timur dan juga Indonesia.

Setelah pembantaian itu, Timor Timur kembali tertutup bagi dunia luar, sementara kegiatan-kegiatan Intel semakin meningkat.... Apa atau siapa yang ditakuti oelh pasukan-pasukan pendudukan Indonesia ? Penduduk yang tak berdaya, penduduk yang menurut anda, Tuan-tuan yang terhormat, sudah puas dengan Integrasi ?

Di PBB Indonesia tidak dapat menghapuskan kenyataan bahwa Portugal adalah salah satu pihak yang punya kepedulian terhadap pemecahan masalah ini. Juga, Jakarta seharusnya jangan sekali-

kali lupa bahwa rakyat Maubere telah menunjukkan bahwa ide, tujuan untuk apa mereka telah berjuang dan melawan, sampai hari ini tidak mati manusia bisa mati tapi ide-ide tetap hidup.

Seandainya pemerintah Indonesia tidak mengetahui hal itu, BAIS pasti sangat paham. Saksi Saturnino da costa Belo, adalah bukti nyata semangat kepahlawanan rakyat ini. Kepalsuan dari surat keterangan dokter yang cepat-cepat dibuat yang menyatakan bahwa Saturnino sakit seyogyanya harus membuat anda malu sekali, semua tuan-tuan yang hadir disini, karena anda tahu sekali bahwa permasalahannya terpulang pada anda disini.

Slogan politik lain yang seringkali digunakan oleh para pejabat pemerintah adalah era Globalisasi (...) Nilai-nilai universal hak dan kebebasan, hak keadilan internasional dan perdamaian harus tetap berlaku dan, saya yakin akan berlaku. Dalam putusan sidang peradilan, hal itu dapat dibaca, mengingat bahwa sidang peradilan dalam kasus ini tidak akan mencampuri masalah-masalah politik dan internasional dari negara manapun, karena itu bukan kompetensi yuridisnya.

Sidang peradilan ini telah terperangkap dalam kontradiksinya sendiri, ketika ingin mengadili saya dengan mengira-ngira kejahatan-kejahatan melawan negara Indonesia, padahal masalah Timor Timur kedudukannya justru masih merupakan masalah politik internasional.

Pada hari pertama dan pada hari-hari berikutnya, mereka menanyai saya apakah saya menganggap diri saya seorang ndonesia dan saya selalu menjawab sebagai berikut: "Apabila saya mengatakan 'ya', bapak-bapak[4] tidak akan percaya". Mula-mula mereka tertawa tapi kemudian mereka menggertakan gigi.

Jenderal-jenderal Indonesia tidak peduli terhadap jiwa, hati nurani rakyat. Mereka cepat puas kalau kami melakukan apa yang mereka maui. Saya tidak tahu apakah ini karena kenaifan mereka ataukah ini karena budaya latihan kemiliteran mereka.

Saya tahu bahwa BAIS telah melakukan persiapan-persiapan yang perlu supaya saya luput dari hukuman mati dan apabila saya memuji integrasi saya akan dibebaskan.

Saya ingin bahwa sekali waktu di Jakarta, sebagai variasi terhadap kejenuhan mereka untuk merekam seluruh gerak-gerik saya didalam penjara, mereka membawa saya dengan tangan diborgol keliling kota dan mereka tunjukkan pada saya emas dipuncak Monas, monumen nasional Indonesia. Rasanya saya ingin berteriak kepada para penjaga saya, bahwa saya tidak pernah akan menjual jiwa saya seharga seluruh emas dipuncak monas, apalagi menjual seluruh rakyat saya. Saya tidak dapat mengkhianati cita-cita rakyat saya untuk pada suatu hari hidup bebas dialam merdeka.

Saya tidak pernah dapat menerima pendudukan secara kriminal Timor Timur hanya untuk dapat hidup beberapa tahun lagi. Perjuangan saya lebih tinggi nilainya daripada jiwa saya sendiri. Rakyat Timor Timur telah mengorbankan jiwa mereka dan masih tetap menderita.

---

[4]) Kata sindiran yang digunakan orang Timor Timur terhadap laki-laki Indonesia. *Penterjemah*

Saya tetap menghimbau pentingnya perlunya dialog yang mengikut sertakan orang Timor Timur. Saya selalu mengatakan kepada semua orang yang mau mendengar saya bahwa rakyat Maubere tidak suka istilah "pembangunan". masalahnya adalah bahwa [pembangunan] itu tidak merdeka. Kemerdekaan itulah yang dijunjung tinggi oleh rakyat saya, tujuan perjuangan mereka. Dom [Carlos] Ximenes Belo [Uskup Dili] telah menyatakan secara tepat ketika ia menulis kepada Sekjen PBB bahwa: " Kami sedang mati sebagai rakyat dan sebagai bangsa".

Dutabesar Indonesia untuk PBB datang kepada saya dan meminta kerjasama saya. Ia meminta saya untuk tetap konsisten dengan apa yang telah saya katakan. Tampaknya, orang-orang Indonesia telah lupa sama sekali bahwa saya telah berjuang selama 17 tahun, dan supaya tetap konsisten saya harus tetap konsisten terhadap rakyat saya dan tidak pernah harus konsisten terhadap pembunuh rakyat saya, terhadap para penyerbu tanah air saya.

(.....) Berdasarkan hukum internasional, khususnya resolusi- resolusi PBB, Timor Timur masih berada dibawah administrasi Portugal. Dengan Dutabesar Indonesia yang baru di PBB, tuan Nugroho, kami telah membicarakan masalah Timor Timur dalam konteks itu. Dengan kata lain, kami tidak boleh keluar dari konteks ini, karena akan perhitungan-perhitungan, prediksi-prediksi, atau analisa-analisa yang dibuat diluar konteks itu meleset. Dan, berdasarkan konteks itu, maka Timor Timur masih manjadi [tidak jelas] oleh pemerintah Indonesia dihadapan PBB dan dihadapan masyarakat Internasional.

Menteri Ali Alatas dalam sebuah pidatonya bulan Januari mengatakan sebagai berikut: "Seandainya kami tidak menerima, seandainya Jakarta tidak menerima suatu referendum, itu bukan karena kami takut kalah suara, melainkan karena sudah begitu banyak orang yang sudah begitu banyak menderita".

Dutabesar [Indonesia] untuk PBB mengatakan pada saya: "Masalah adalah bahwa suatu dialog menurut persepsi kami takut (dan karenanya oleh jakarta) punya batas-batasnya. Kami tidak menerima referendum".

Tahun 1983, selama gencatan senjata, Mayor-mayor [nama tidak jelas] dan Gatot [Purwanto] menyatakan pada kami secara jelas: "Kami tidak menerima referendum karena kami tahu bahwa seluruh rakyat berpihak pada Fretelin".

Dimarkas BAIS, dua atau tiga kali saya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah anda mengharapkan kedatangan delegasi parlemen Portugal [DPP] Apakah anda menjamin [sic] bahwa apa yang ingin dilakukan merupakan kehendak mayoritas rakyat Timor Timur ?

Mengapa takut pada peristiwa tersebut [kunjungan DPP] Mengapa Timor Timur penuh dengan pasukan-pasukan yang baru didatangkan yang menduduki jalan-jalan, menduduki semua desa ? Mengapa Jakarta pada akhirnya menghalangi kedatangan misi parlementer tersebut ?

Banyak saksi yang dibawa kesini telah dicegah untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Semua terdakwa harus menyatakan bahwa mereka telah menyerah atas keinginan mereka sendiri secara bebas.

Sidang pengadilan ini telah menghukum para korban yang waktu itu ditahan di polwil, para narapidana yang diperlakukan secara tidak manusiawi. cukup untuk melihat para saksi yang dibawa kesini dan yang masih berada dipenjara, mereka begitu kurus.

Apakah mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan itu pernah dibawa kedepan meja hijau untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana mereka ? Apalah nilai hukum yang menutup matanya bagi kriminalitas 12 November yang memuakkan ? Nilai moral apa, pola keadilan apa, yang dijunjung tinggi oleh orang Indonesia, untuk menyatakan para kriminal sebagai pahlawan dan menghukum para korban.

Seluruh proses peradilan saya adalah urusan BAIS dan Kopassus, dan perwira-perwira mereka memenuhi ruangan ini, mengawasi semua hal dan semua orang. Jakarta harus malu atas tingkahlaku kriminilnya di Timor Timur dan seharusnya sejak lama, mengakui bahwa kekalahannya di Timor Timur.

Jenderal-jenderal Indonesia seharusnya dibuat sadar bahwa mereka telah dikalahkan di Timor Timur. Disini pada hari ini sebagai komandan Falintil, angkatan bersenjata pembebasan nasional Timor Timur yang jaya, saya mengaku kalah dilapangan. Saya tidak malu mengatakan hal itu. Sebaliknya saya bangga atas kenyataan bahwa sebuah lasykar gerilya yang kecil telah berhasil melawan suatu bangsa sebesar Indonesia, suatu kekuatan regional yang dengan cara pengecut telah menyerang kami dan bermaksud menundukkan kami dengan hukum teror dan kriminalitas, dengan hukum kekerasan, pengejaran, pemenjaraan dan pembunuhan. Saatnya sudah tiba bagi Jakarta untuk mengakui kekalahan politisnya dilapangan.

Saya tidak tahu apakah itu dimaksudkan untuk mengesankan saya bahwa mereka menempatkan tentara bersenjata sepanjang rute perjalanan saya dari polwil sampai ke pengadilan.

Keretakan situasi sekarang sudah merupakan suatu tuntutan sejarah. Apabila [perubahan mendasar] tidak terjadi hari ini, hari esok akan menjadi saksi dari perubahan-perubahan yang tak dapat lagi diputar kebelakang.

Yang tidak dapat lagi dibalik kebelakang bukanlah pemaksaan keadaan sekarang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dengan kekuatan senjata. Yang tidak dapat lagi dielakkan adalah koreksi yang dilakukan oleh sejarah terhadap kesalahan-kesalahan orang-orang yang ambisius, koreksi terhadap kejahatan para diktator, serta koreksiterhadap kekejaman-kekejaman perang para penjajah.

Kehancuran bekas imperium Uni Soviet menunjukan bahwa kebijakan-kebijakan yang tercapai atas tekanan senjata, tak akan bertahan sepanjang waktu.

Perputaran roda sejarah yang lama telah sedang dan terus akan mengakui kebenaran itu. Roda sejarah yang telah menhancurkan penjajahan Eropa, juga semua bentuk kolonialisme baru.

Roda sejarah telah menghancurkan rejim-rejim penindas serta pemerintahan-pemerintahan yang ekspansionis.

Akal sehat (rasio) tidak didasarkan pada kekuasaan. Akal sehat yang berdiri sendiri tidaklah berbahaya. Akal sehat berada dipihak saya, dipihak rakyat saya.

Saya telah dibujuk rayu dengan berbagai cara untuk menyakinkan saya agar bersikap sebagai orang Indonesia yang tunduk. Saya terpaksa bersikap demikian, begitu pula para saksi yang telah

dibawa kesisi. Saya tahu bahwa dibalik punggung saya, orang- orang BAIS dan Kopassus menggertakkan gigi mereka menahan marah. Mereka seharusnya berbuat begitu karena merekalah pembunuh rakyat Maubere yang sesungguhnya.

(...) Rakyat Timor Timur telah lebih banyak menderita dibandingkan dengan saya karena mengingkari penderitaan-penderitaan tersebut.

Siapa yang takut referendum? Mengapa mereka takut referendum? Saya tidak takut referendum. Dan bila pada hari ini dalam sebuah referendum dibawah pengawasan Internasional, rakyat Maubere memilih Integrasi saya akan menghimbau kawan-kawan saya dihutan untuk meletakan senjata mereka dan saya akan menawarkan kepala saya untuk dipancung didepan umum.

Barang siapa yang takut referendum takut pada kebenaran. Pemilihan-pemilihan umum di Timor Timur, semuanya hanyalah merupakan kelanjutan dari kepalsuan penguasa pendudukan.

Mengapa ada petugas-petugas militer didepan sidang pengadilan yang memuakkan ini ? Mengapa ada tentara bersenjata siap sepanjang rute perjalanan dengan senjata mereka dalan keadaan siapa siaga ?

(...) Secara politis Integrasi yang dimaksudkan belum dapat membuktikan kehendak rakyat dan tidak dilakukan dengan penuh kebebasan.

Secara ekonomis, ide bahwa Timor Timur tidak memiliki jaminan untuk membangun dirinya sendiri juga merupakan suatu kepalsuan. Persetujuan Celah Timor menunjukan bahwa Indonesia dan Australia melakukan politik perampokan yang merupakan tujuan ekspansionis dari satu pihak dan politik keterlibatan dari pihak yang lain.

Timor Timur yang berjanji akan menjadi sebuah negara tanpa persenjataan, dalam hal ini, tanpa tentara, tidak akan pernah menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia yang besar dan kuat yang memiliki sebuah angkatan bersenjata yang tanguh.

Saya ulangi Timor Timur tidak akan memecah belah bangsa Indonesia yang besar, karena tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur ingin memelihara hubungan-hubungan yang baik Hukum Internasional tidak membuat perkeccualian yang didasarkan atas kekuatan serta bentuk-bentuk kolonialisme yang lain, yang terdapat disuatu wilayah tertentu. Rakyat saya menentang aneksasi dan menolak situasi yang dikontrol secara kejam dan represif.

Saya himbau generasi muda Indonesia untuk memahami bahwa rakyat Timor Timur lebih menghargai kemerdekaan, keadilan dan perdamaian daripada pembangunan yang dijalankan disini dengan bantuan Australia, AS dan negara-negara Eropa yang memelihara hubungan ekonomis mereka dengan Jakarta.

Saya himbau rakyat Indonesia untuk memahami bahwa berdasarkan prinsip-prinsip universal dan hukum Internasional Timor Timur dianggap suatu daerah yang tak berpemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan-peraturan dekolonisasi. Saya himbau rakyat Indonesia untuk memahami bahwa Timor timur tidak merupakan ancaman bagi Indonesia atau suatu faktor yang mengancam